

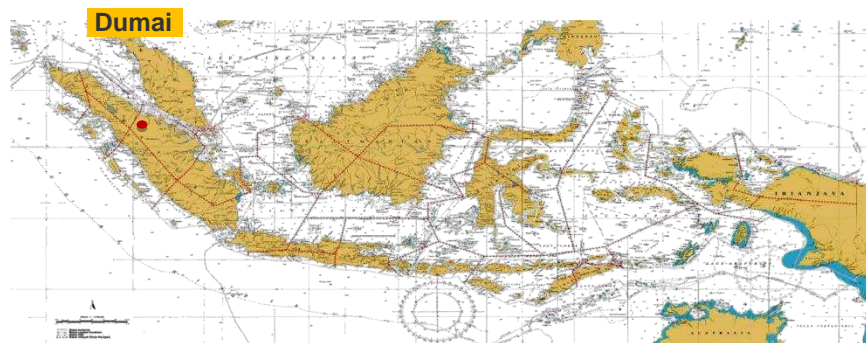
BAB I

GAMBARAN UMUM INSTANSI

1.1 Sejarah Singkat Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Perairan di wilayah kerja Provinsi Riau sebagian besar dicakup oleh Distrik Navigasi Kelas I Dumai, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Navigasi. Provinsi Riau terdiri dari pulau-pulau dengan garis pantai sepanjang 1.352 mil, alur pelayaran sepanjang 339 mil, dan pintu masuk Pelabuhan Dumai sepanjang 57,5 mil.

Letak geografis wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai meliputi sebagian besar perairan Provinsi Riau, yakni: Dumai, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Sei. Pakning, Selat Panjang, Bagan Siapi-api, Panipahan, Tembilahan, Rengat, Ka. Enok, Tg. Parit, Tg. Medang, Tg. Rambut, Pulau Jemur dan Pulau Hiu Kecil yang merupakan wilayah strategis dan potensial, karena daerah-daerah tersebut berhadapan langsung dengan Selat Malaka.



Gambar 1.1.1 Peta Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Sumber : Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Karena sangat terikat dengan peraturan internasional, tanggung jawab dan fungsi pemerintah terkait keselamatan kapal pesiar tidak dapat dialihkan (wajib). Namun demikian, untuk memenuhi permintaan jasa navigasi yang terus meningkat sekaligus mewujudkan keselamatan pelayaran dengan paradigma transportasi baru, masih diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang ada saat ini.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2006 tanggal 12 Juni 2006, Distrik Navigasi Kelas I Dumai bertanggung jawab melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan alat bantu navigasi kapal pelayaran, telekomunikasi kapal pelayaran, kegiatan pengamatan laut, survei hidrografi, dan pemantauan alur dan penyeberangan dengan menggunakan fasilitas instalasi.

Seiring dengan pesatnya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, kesulitan yang dihadapi Distrik Navigasi Kelas I Dumai semakin rumit dan bergerak cepat. Implikasinya, diperlukan inovasi dan perubahan yang akomodatif dan berkelanjutan, baik melalui penataan kelembagaan, manajerial (pendekatan keterampilan kepemimpinan), maupun pengembangan SDM pegawai, dalam upaya menciptakan citra organisasi di mata masyarakat dengan memberikan pelayanan publik. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Gambar 1.1.2 Wilayah Kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Sumber : Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Perubahan besar dalam sistem dan struktur organisasi, strategi, pola pikir birokrat, dan latar belakang budaya pegawai tidak diragukan lagi akan dihasilkan dari konsep di balik pergeseran paradigma bagaimana pemerintah berfungsi (mentalitas dan etos kerja). Untuk mengantisipasi dan menghadapi dinamika persaingan yang kompetitif, serta untuk menangkap “peluang” dan mengatasi “tantangan” di pasar global, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu menjalankan tugasnya dengan kompetensi dan profesionalisme. sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi bidang pekerjaannya.

Potensi wilayah kerja meliputi aktivitas pelayaran nasional dan internasional memerlukan pengaturan *Traffic Sparation Scheme* (TSS) di Selat Malaka, juga kewajiban Internasional berupa pembentukan *Sea Line* (ALKI) yang telah diratifikasi oleh *International Maritime Organization* (IMO) untuk menghubungkan Utara Selatan dan Selatan Utara Indonesia termasuk pembangunan fasilitasnya. Sesuai dengan terbitnya PP No. 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perhubungan, maka pengelolaan bidang keselamatan pelayaran yang diselenggarakan oleh Distrik Navigasi Kelas I Dumai harus dapat meningkatkan metode melalui penataan kelembagaan dan kinerja sumber daya manusianya secara bertahap agar dapat berperan aktif dalam memenuhi tuntutan keselamatan pelayaran yang semakin meningkat. Implikasinya, Distrik Navigasi Kelas I Dumai melakukan berbagai upaya dan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, dan kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja navigasi guna memberikan pelayanan keselamatan pelayaran yang unggul dan dapat diandalkan kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa maritim pada tingkat nasional dan internasional.



Gambar 1.1.3. Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Sumber : Website Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan operasional navigasi, khususnya administrasi pemerintahan Distrik Navigasi Kelas I Dumai saat ini berbasis komputer sesuai dengan perubahan globalisasi dan kemajuan TI untuk pelayanan keselamatan kapal pesiar kepada masyarakat dan pengguna jasa maritim. Berbagai aplikasi sistem komputerisasi, seperti database Barang Milik Negara (SKBMN), Program Sistem Akuntansi Instansi (SAI), database Program Sistem Informasi

Kepegawaian (SIK kepegawaian), Program Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Database keuangan Program Sistem Informasi Kepegawaian, dan e-monitoring. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, setiap Pegawai Negeri Sipil Kelas I Pelayaran Dumai berkewajiban untuk berupaya meningkatkan kompetensi diri dan profesionalisme di tempat kerja (learning organization) guna mencapai kinerja dan tujuan organisasi.

1.2 Visi Dan Misi Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Visi menurut Arman (2008) adalah pernyataan yang menjabarkan hal-hal yang hendak diwujudkan perusahaan diwaktu mendatang. Sedangkan misi menurut Arman (2008) adalah kumpulan pertanyaan yang mencerminkan hal-hal yang tengah atau hendak dijadikan atau mau dicapai dalam waktu dekat. Visi dan Misi adalah usaha, adanya visi dan misi akan memudahkan dalam menyusun sebuah SOP. Sebab visi dan misi adalah tujuan atau cita cita sebuah usaha. SOP akan membantu mewujudkan cita-cita tersebut.

Distrik Navigasi Kelas I Dumai adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kenavigasian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut mempunyai visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan:

1.2.1 Visi

Terwujudnya optimalisasi fungsi kenavigasian yang handal sebagai urat nadi terselenggaranya keselamatan pelayaran di wilayah perairan Riau.

1.2.2 Misi

1. Pemberdayaan kualitas/kompetensi sumber daya manusia.
2. Perwujudan pengaturan, kebijakan dan kelembagaan yang dinamis, efektif dan efisien.
3. Peningkatan kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana sarana bantu navigasi pelayaran, kapal negara, telekomunikasi.

4. Peningkatan keikutsertaan (kemitraan) pelaku ekonomi/swasta dalam pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran.
5. Peningkatan keikutsertaan masyarakat maritim sebagai pengguna jasa untuk pengamanan sarana/prasarana.
6. Perwujudan lingkungan laut bersih dan budaya hemat energi.

1.3 Tujuan Dan Fungsi Distrik Navigasi Kelas I Dumai

1.3.1 Tugas Pokok

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2006 Melaksanakan perencanaan pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, serta kegiatan Pengamatan Laut, Survey Hidrografi, Pemantauan Alur dan Perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

1.3.2 Fungsi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2006

1. Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut dan Survey Hidrografi serta Pemantauan Alur dan Perlintasan.
2. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut dan Survey Hidrografi, serta Pemantauan Alur dan Perlintasan.
3. Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, dan Fasilitas Pangkalan serta Bengkel.
4. Pelaksanaan Pengamatan Laut dan Survey Hidrografi, serta Pemantauan Alur dan Perlintasan.
5. Pelaksanaan urusan logistik.
6. Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawasan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran,

Kapal Negara Kenavigasian, Fasilitas Pangkalan, Bengkel, Pengamatan Laut, Survey Hidrografi, serta Pemantauan Alur dan Perlintasan.

7. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.

1.4 Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Dalam melaksanakan perencanaan pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, serta kegiatan Pengamatan Laut, Survey Hidrografi, Pemantauan Alur dan Perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2006. Distrik Navigasi Kelas 1 Dumai dipimpin oleh bapak Capt, Heru Susanto, M.M sebagai Kepala Distrik Navigasi dibantu oleh bapak Libertus Tampubolon, S.T, M.T sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan juga bagian-bagian devisi yang menjalankan tugas berdasarkan tupoksi masing-masing.

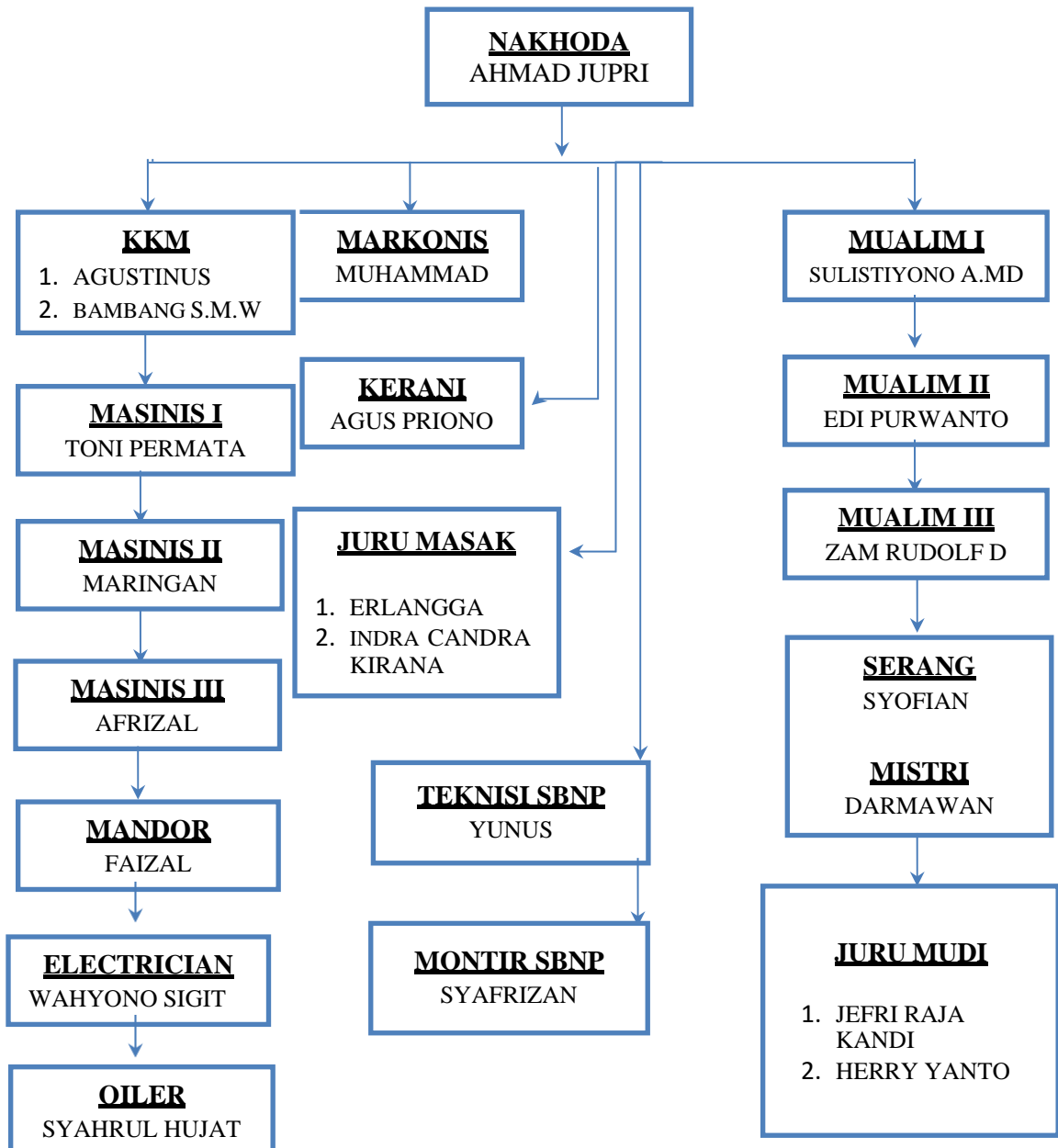


Gambar 1.4.1 Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Sumber : Website Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

KN. Rupas adalah Kapal Negara Kelas I dibuat tahun 2017 memiliki panjang kapal 60 Meter dan memiliki Engine Power sebesar 2600 HP dan memiliki ABK Kapal sebanyak 23 Orang. Adapun struktur organisasi KN Rupas adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KAPAL NEGARA KELAS I KENAVIGASIAN KN. RUPAT**



Gambar 1.4.2 Struktur Organisasi KN Rupas Kelas I

Sumber : Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Sesuai struktur organisasi kapal kelas I kenavigasian KN.RUPAT di atas, dapat dijelaskan tugas dari masing- masing bidang, antara lain:

1. Nakhoda

Nakhoda kapal umum nya bertugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang ada di atas kapal. baik itu kapal itu sendiri, muatan, Perwira maupun ABK yang ada di atas kapal. Agar mereka bekerja sesuai dengan perosedur yang telah di tetapkan oleh ISM Code (International Safety Management Code) dari perusahaan perkapalan.

2. Mualim I

Umumnya Mualim I bertugas sebagai pengatur muatan di atas kapal, persediaan air tawar. Mualim I juga bertugas sebagai Perwira deck dan melaksanakan tugas jaga pukul 04:00-08:00/16:00-20:00 WIB

3. Mualim II

Umumnya Mualim II bertugas membuat jalur atau rute pelayaran pada peta laut yang akan di gunakan. saat itu Mualim II juga bertugas sebagai pengatur muatan di atas kapal, Mualim II juga melaksanakan tugas jaga pukul 00:00- 04:00/12:00-16:00 WIB.

4. Mualim III

Umumnya Mualim III bertugas sebagai perwira permakanan. Mualim III juga bertugas sebagai Perwira deck dan melaksanakan tugas jaga pukul 08:00-12:00/20:00-24:00 WIB.

5. KKM

KKM (Kepala Kamar Mesin) bertugas sebagai penanggung jawab penuh terhadap atas semua mesin yang ada atas kapal. Baik itu mesin induk, mesin bantu, mesin pompa, mesin crane, mesin skoci, mesin kemudi, mesin frezeer dan lain-lain.

6. Masinis I

Masinis satu bertanggung jawab atas mesin-mesin induk, membantu kepala kamar mesin dalam melakukan tugas dan tanggung jawab di kamar mesin, dan menjadi Perwira jaga pada saat kapal berlayar di bantu dengan oiler.

7. Masinis II

Masinis dua bertanggung jawab atas semua mesin bantu, membantu kepala kamar mesin dalam melakukan tugas dan tanggung jawab di kamar mesin, dan menjadi Perwira jaga pada saat kapal berlayar di bantu dengan oiler.

8. Masinis III

Masinis tiga bertanggung jawab atas perawatan dan operasi mesin bantu, membantu kepala kamar mesin dalam melakukan tugas dan tanggung jawab di kamar mesin, dan menjadi Perwira jaga pada saat kapal berlayar di bantu dengan oiler.

9. Mandor mesin

Mandor mesin adalah menerima pekerjaan yang di serahkan masinis 1. Mandor mesin juga memiliki peranan penting sebagai penjaga kebersihan ruang mesin.

10. Electrician

Electrician atau lebih dikenal juru listrik ini bekerja di bawah KKM (kepala kamar mesin). Dia bertugas merawat dan memperbaiki sistem kelistrikan di kapal.

11. Serang

Serang adalah kepala kerja ABK deck, akan melakukan supervisi, yaitu memberi tugas kepada bawahannya, mengarahkan, memeriksa apakah tugas itu dikerjakan dengan baik atau tidak.

12. Mistri

Mistri adalah ABK deck yang berurusan dengan sounding tanki-tanki, air tawar, air ballast. Bekerja di bawah arahan Muallim I. Jika tidak ada tugas khusus, ikut kerja harian di bawah serang.

13. Markonis

Markonis bertugas sebagai operator radio atau komunikasi. Markonis bertanggung jawab menjaga keselamatan kapal dari marabahaya baik itu yang ditimbulkan dari alam seperti badai, ada kapal tenggelam, dan lain-lain.

14. Kerani

Kerani bertugas menerima dan memproses ketibaan kapal, menyediakan tuntutan iuran-iuran dan cukai-cukai.

15. Juru masak

Juru masak bertanggung jawab atas segala makanan, baik itu memasak, pengaturan menu makanan, dan persediaan makanan.

16. Juru mudi

Melakukan dinas jaga bersama Perwira dan menjadi juru mudi untuk mengemudikan kapal pada saat kapal berlayar, dengan jam jaga yang bergantian mengikuti jam jaga Perwira.

17. Oiler

Membantu masinis pada saat dinas jaga, meminyaki mesin yang bergerak serta mencatat temperatur dan tekanan air tawar maupun minyak pelumas.

18. Teknisi & montir SBNP

Teknisi bertugas bertanggung jawab atas perbaikan dan perawatan SBNP (Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran) sedangkan montir bertugas untuk membantu tugas dari teknisi SBNP.

1.5 Ruang Lingkup Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Sebanyak 158 orang bekerja di Distrik Navigasi Kelas I Dumai yang sebagian besar ditugaskan pada Gugus Tugas SBNP (Fasilitas Bantuan Navigasi Pelayaran), KN (Kapal Negara), SROP (Stasiun Radio Pesisir), Bengkel, dan Pengamatan Kelautan. Sangat penting untuk mengelola karyawan dengan baik. Dalam artian pimpinan Kecamatan Navigasi Kelas I Dumai harus memodifikasi kebijakan penempatan pegawai yang mencerminkan keunikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing bagian dan unit kerja.

Untuk mencapai tujuan organisasi, setiap karyawan harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan jumlah pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kapabilitas yang dimilikinya. Mereka juga harus melakukannya dengan cara yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (*The right man in the right place*).

Wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai mencakup wilayah strategis dan potensial di sekitaran selat malaka, seperti :

1.	Dumai	9.	Tg. Parit
2.	Pulau Rupa	10.	Tg. Medang
3.	Pulau Bengkalis	11.	Tg. Rambut
4.	Sei. Pakning	12.	Pulau Jemur
5.	Selat Panjang	13.	Pulau Hiu Kecil
6.	Rengat	14.	Panipahan
7.	Ka. Enok	15.	Tembilahan
8.	Bagan Siapi-api		

Tabel 1.5.1. Wilayah Kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai

Sumber : Distrik Navigasi Kelas I Dumai